

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR
54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

(Studi Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011
pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai)

TESIS

OLEH

**MARIATI
NPM. 101801085**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**IMPLEMENTASI PERATURAN PRESIDEN NOMOR
54 TAHUN 2010 TENTANG PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH**

(Studi Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011
pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai)

TESIS

OLEH

**MARIATI
NPM. 101801085**

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik
pada Program Studi Magister Administrasi Publik Program Pascasarjana
Universitas Medan Area



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2012**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

HALAMAN PERSETUJUAN

**Judul : Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Tentang
Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada
Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai)**

Nama : Mariati

NPM : 101801085

Menyetujui

Pembimbing I



Drs. Kariono, MA.

Pembimbing II



Isnaini, SH, M.Hum.

**Ketua Program Studi
Magister Administrasi Publik**



Dr. Warjio, MA.

Direktur



Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS.

Telah diuji pada Tanggal 04 Mei 2012

Nama : Mariati

NPM : 101801085



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Warjio, MA.

Sekretaris : Ir. Azwana, MP.

Pembimbing I : Drs. Kariono, MA.

Pembimbing II : Isnaini, SH, M.Hum.

Penguji Tamu : Prof. Dr. Marlon Sihombing, MA.

PERNYATAAN KEORISINILAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Mariati

NPM : 101801085

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis ini dengan judul :

“ Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai)”

Adalah benar merupakan hasil penelitian yang saya kerjakan sendiri tanpa meniru atau menjiplak hasil penelitian orang lain.

Apabila di kemudian hari bahwa tesis ini tidak orisinal dan merupakan hasil plagiat, maka saya bersedia di cabut gelar magister yang saya peroleh.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, September 2012

Yang menyatakan,



Mariati

A B S T R A K

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai)

N A M A : MARIATI

NPM : 101801985

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai. Sampel diambil sebanyak 34 orang pegawai yang terlibat dalam dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai. Analisis data dilakukan secara deskriptif dengan tabel tunggal dan frekuensi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek organisasi, interpretasi dan pelaksanaannya secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor utama yang mempengaruhi menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai adalah faktor faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana / prasarana yang ada serta masih terbatasnya pemahaman aparat sebagai implementor dari kebijakan (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010), mengingat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini masih baru diterapkan. Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut : Sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada semua unit atau SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.

Kata kunci : *Implementasi kebijakan, Perpres 54 Tahun 2010, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*

KATA PENGANTAR

Puji syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini sebagai suatu syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Adapun judul Tesis ini adalah Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Studi Tentang Pengadaan Kenderaan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai)". Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih dirasakan sekali banyak kekurangan dan kelemahan, mengingat keterbatasan penulis. Dalam penyelesaian tesis ini, banyak pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof.Dr. A. H. M. Ya'kub Matondang MA, Rektor Universitas Medan Area
2. Ibu Prof.Dr.Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Isnaini, SH, M.Hum, Sekretaris Program Studi MAP, Program Pascasarjana Universitas Medan Area, sebagai sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.

6. Bapak Walikota Kota Tanjungbalai atas izin belajar yang diberikan kepada penulis.
7. Bapak Sekretaris Daerah Kota Tanjungbalai beserta staf atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama peneliti mengadakan penelitian.
8. Bapak dan Ibu dosen serta staf pengajar PPs Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian Tesis ini.
9. Terimakasih pula kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberi dorongan dan semangat serta do'a demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Semoga amal sholeh mereka semua mendapat balasan yang berlimpat ganda dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

Medan, Mei 2012

Penulis

Mariati

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN

ABSTRAKSI	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vi

BAB I : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah.....	8
1.3. Tujuan Penelitian.....	8
1.4. Manfaat Hasil Penelitian	9

BAB II : Tinjauan Pustaka

2.1. Kebijakan Publik	10
2.1.1 Pengertian Kebijakan Publik	10
2.1.2 Proses Analisis Kebijakan Publik	13
2.2. Implementasi Kebijakan.....	26
2.3. Pendekatan dalam Implementasi Kebijakan.....	35

BAB III : METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian.....	41
3.2. Lokasi Penelitian	41
3.3. Populasi dan sampel	41
3.4. Variabel Penelitian.	42
3.5. Teknik Pengumpulan Data.	43
3.6. Analisis Data.	43

BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Gambaran Umum Kota Tanjungbalai	46
4.1.1 Letak dan Geografis	46
4.1.2 Sektor Perdagangan	47
4.1.3 Visi dan Misi	49
4.2. Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai	50
4.2.1 Tugas dan Fungsi	50
4.2.2 Tata Kerja	51
4.2.3 Struktur Organisasi	57

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

5.1. Hasil Penelitian.....	58
5.1.1 Karakteristik Responden.....	58
5.1.2 Variabel Penelitian.....	61
5.2. Analisis Data	79

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan.....	108
6.2. Saran-Saran	109

DAFTAR PUSTAKA	110
-----------------------------	------------



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Tata pemerintahan yang baik dan bersih (*Good Governance and Clean Government*) adalah seluruh aspek yang terkait dengan kontrol dan pengawasan terhadap kekuasaan yang dimiliki Pemerintah dalam menjalankan fungsinya melalui institusi formal dan informal. Untuk melaksanakan prinsip *Good Governance and Clean Government*, maka Pemerintah harus melaksanakan prinsip-prinsip akuntabilitas dan pengelolaan sumber daya secara efisien, serta mewujudkannya dengan tindakan dan peraturan yang baik dan tidak berpihak (*independen*), serta menjamin terjadinya interaksi ekonomi dan sosial antara para pihak terkait (*stakeholders*) secara adil, transparan, profesional, dan akuntabel.

Peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu didukung dengan pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan keuangan negara yang dibelanjakan melalui proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, diperlukan upaya untuk menciptakan keterbukaan, transparansi, akuntabilitas serta prinsip persaingan/kompetisi yang sehat dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dibiayai APBN/APBD, sehingga diperoleh barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas serta dapat dipertanggung-jawabkan baik dari segi fisik, keuangan, maupun manfaatnya bagi kelancaran tugas Pemerintah dan

pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan komprehensif, sesuai dengan tata kelola yang baik.

Pengaturan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diharapkan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif, efisiensi belanja negara, dan percepatan pelaksanaan APBN/APBD. Selain itu, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berpedoman pada Peraturan Presiden ini ditujukan untuk meningkatkan keberpihakan terhadap industri nasional dan usaha kecil, serta menumbuhkan industri kreatif, inovasi, dan kemandirian bangsa dengan mengutamakan penggunaan industri strategis dalam negeri. Selanjutnya, ketentuan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan Presiden ini diarahkan untuk meningkatkan ownership Pemerintah Daerah terhadap proyek/ kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema pembiayaan bersama (*co-financing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini, meliputi:

DAFTAR PUSTAKA

- Anderson, James E, 1976, *Public Policy Making*, New York, Holt Rinechart and Bapak M. Safii nston.
- Dye, Thomas R., 1995, *Understanding Public Policy*, New Jersey: Prentice Hall.
- Dunn, Bapak M. Safii Iliam N, 1994, *Public Policy Analysis; An Introduction*, Englewood Clifs, New Jeresy, Prenticel-Hall Inc, Indonesian Edition: Pengantar Analisis Kebijakan Publik, 1998, Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho, *Otonomi Daerah : Desentralisasi Tanpa Revolusi*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2000.
- Edward III, 1980. *Implementation Public Policy*. Washington DC : Congresional Quarter Press.
- Gibson, James L. *Organisasi dan Manajemen*, Penerbit Erlangga. Jakarta. 2000
- Islamy, M. Irfan, 2000, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, Jakarta: Sinar Grafika..
- Ibrahim, Amin, 2008. *Pokok-Pokok Administrasi Publik dan Implementasinya*. Jakarta: Refika Aditama.
- Jones, Charles O., 1991. *Pengantar Kebijakan Publik*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Kartasasmita, Pius Suratman, 2010. *Bringing The Public Back In : Revitalisasi Konsep Publik dalam Pemikiran dan Praktek Administrasi Publik di Indonesia*. Jakarta; Graha Ilmu.
- Kristiadi, J.B, 1997. *Perspektif Administrasi Publik Menghadapi Tantangan Abad 21*, UNPAD, Bandung.
- Kaloh, J. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah : Sauatu Solusi dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. Jakarta: Rineka Ilmu.
- Mazmanian, Daniel A. and Paul A. Sabatier. 1981. *Effective Policy Implementation*. Toronto: D.C. Heath.
- Manila, I GK, 1996. *Praktek Manajemn Pemerintahan Dalam Negeri*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Meter, Donald Van, dan Carl Van Horn, 1975, *"The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework dalam Administration and Society 6*, 1975, London: Sage.

- Mustopadidjaja, AR, 1992, *Studi Kebijakan: Perkembangan dan Penerapannya Dalam Rangka Administrasi dan Pembangunan*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.
-, 1999, *Manajemen Proses Kebijakan*, Jakarta Lembaga Administrasi negara-Republik Indonesia
- Nugroho D, Riant, 2004. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta : PT. Elex Media Komputindo
- Osborne, David, dan Ted Gaebler, 1993, *Reinventing Government: How the Entrepreneurial Spirit is Transforming the Public Sector*, New York: Plume Book.
- Pemerintah Kota Tanjungbalai, 2008. *Keputusan Walikota Tanjungbalai Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Uraian Tugas Dan Fungsi Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai*.
- Republik Indonesia, 2004. *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Gramedia.
- Republik Indonesia, 2010. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Soetopo, 1999, *Kebijakan Publik dan Implementasi*, Jakarta: Lembaga Administrasi negara - Republik Indonesia.
- Sugiyono, 2004. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : Alfabeta.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2002. *Kebijakan Publik Yang Membumi : Konsep, Strategi & Kasus*. Yogyakarta : Kerjasama YPAPI dengan Lukman Ofset.
- Tjokroamidjojo, Bintoro, "Good Governance: Paradigma Baru Manajemen Pembangunan", Jakarta, 20 Juni 2000, *kertas kerja*.
- Toha, Miftah, 2005, *Perspektif Perilaku Birokrasi*, Jakarta: Rajawali.
- Turner, Mark, dan David Hulme, 1997, *Governance, Administration, and Development*, London: MacMillan Press, 1997.
- Wahab, Solichin Abdul, 2002. *Analisa Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi kebijakan Negara*, Malang: Bumi Aksara.
- Wibawa, Samudra, 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Raja Grafindo Persada,
- Wicaksono, Kristian Bapak M. Safii dya, 2010. *Administrasi dan Birokrasi Pemerintah*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*, Yogyakarta: Media Pressindo.